

## Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali

Hevi Wulandari<sup>1</sup>, Siti Aisyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>\*</sup> Korespondensi (e-mail: [sa150@ums.ac.id](mailto:sa150@ums.ac.id))

### Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Gross Domestic Product (GRDP), Human Development Index, unemployment, and the amount of electricity consumption on poverty levels in the provinces of Java and Bali. The analysis model used is panel data regression. The type of data used in this study is secondary data in the form of panel data obtained from the publication data of the Central Bureau of Statistics (BPS) Java and Bali in 2011-2019. The results of this study indicate that the GRDP and the amount of electricity consumption have a negative and significant effect on poverty levels, the unemployment rate has a positive and significant effect on the poverty levels, and the Human Development Index has no effect on poverty levels.

Keywords: GRDP, Human development index, Unemployment, Total electricity consumption, Poverty level.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan jumlah pemakaian listrik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pulau Jawa dan Bali tahun 2011-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah pemakaian listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: PDRB, Indeks pembangunan manusia, Pengangguran, Jumlah pemakaian listrik, Tingkat kemiskinan.

---

*How to cite:* Wulandari, H., & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106-116. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.136>

---

### 1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi permasalahan bagi setiap negara seperti halnya Indonesia yang merupakan negara berkembang (Wargadinata, 2011). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama delapan tahun terakhir persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi naik dan turun. Persentase tertinggi terjadi pada September tahun 2013 sebesar 11,47% dengan jumlah penduduk miskin 28.55 juta orang. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik merilis pernyataan bahwa separuh penduduk Pulau Jawa tergolong miskin. Angka kemiskinan tertinggi disumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kondisi itulah yang memicu pemerintah melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah. Khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah (Zuhdiyaty, 2017).

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 107 dari 189 negara pada tahun 2020. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan (Rustan, 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut (Umiyati, Amril, & Zulfanetti, 2017).

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk di suatu wilayah telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting.

Selain faktor-faktor di atas, ada pula indikator lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Ada juga disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat melemahnya suatu industri sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja. Peningkatan pengangguran menambah jumlah orang yang tidak bekerja dan menyebabkan kemiskinan bertambah (Agustina et al., 2019; Kalsum, 2017; Probosiwi, 2016). Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2011-2012 pengangguran mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 5,3%. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 angkatan kerja yang terserap cukup tinggi, dan dampaknya juga terasa pada kenaikan PDRB.

Salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Beberapa infrastruktur dasar yang penting adalah keadaan jalan, akses sambungan listrik, dan bangunan sekolah. Jalan merupakan infrastruktur penting

dalam memudahkan mobilitas manusia dan barang. Akses sambungan listrik juga menjadi hal yang penting karena berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi (Meidiana & Marhaeni, 2019).

Berdasarkan pada uraian di atas maka pada penelitian ini akan meneliti mengenai tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Pulau Jawa dan Bali serta faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan jumlah pemakaian listrik.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, jumlah pemakaian listrik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali selama kurun waktu tahun 2011-2019 menggunakan alat analisis regresi data panel, yang formulasi model estimatornya adalah:

$$KMS_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TP_{it} + \beta_4 Lis_{it} + e_{it}$$

Dimana:

$KMS_{it}$	: Tingkat Kemiskinan (ribu jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (Ribu Rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
TP	: Tingkat Pengangguran (Persen)
Lis	: Jumlah Pemakaian Listrik (Gwh)
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien Regresi variabel independen
$i$	: unit <i>cross-section</i> provinsi Pulau Jawa dan Bali
$t$	: data <i>time series</i> tahun 2011-2019
$e$	: unsur kesalahan ( <i>error term</i> )

Langkah-langkah estimasinya meliputi: estimasi parameter model dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM); pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji *Chow* dan Uji *Hausman*; uji kebaikan model pada model terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terpilih.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (gabungan dari data *time series* dan *cross section*). Data *time series* adalah data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data *cross section* yaitu data yang diperoleh dari satu atau lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama (Gujarati, 2015). Data *cross section* yang digunakan meliputi 7 provinsi di pulau Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Sosial dan Kependudukan tahun 2011-2019. Adapun data yang digunakan adalah data PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, Pemakaian Listrik dan Tingkat Kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Uji Pemilihan Model Terestimasi

Uji Chow dan Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi terbaik—*PLS*, *FEM*, atau *REM*. Apabila pada uji Chow terpilih *PLS* dan pada uji Hausman terpilih *REM*, maka harus dilakukan uji *Langrange Multiplier (LM)* untuk memilih model terestimasi terbaik antara *PLS* dan *REM*.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section

Variable	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	21719,66	5104,574	6225,792
PDRB	-0,003678	-0,004990	-0,004277
IPM	-275,6442	-39,59977	-56,96535
TP	-173,4480	121,4156	120,2136
LIS	0,074487	-0,022394	-0,017724
<i>R-squared</i>	0,733817	0,993128	0,538526
<i>Adjusted R-squared</i>	0,715459	0,991807	0,506700
<i>F-statistic</i>	39,97379	751,5390	16,92107
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000	0,000000	0,000000

Uji Chow adalah uji statistik untuk memilih antara model terestimasi *PLS* atau *FEM*.  $H_0$  Uji Chow: model adalah *Pooled Least Square (PLS)* dan  $H_A$ -nya: model adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.  $H_0$  diterima jika nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F > \alpha$ ;  $H_0$  ditolak bila nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F \leq \alpha$ . Hasil Uji Chow dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	327,051857	(6. 52)	0,0000

Dari Tabel 2, terlihat nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F$  sebesar 0,000 ( $< 0,01$ ) sehingga  $H_0$  Uji Chow: model adalah *Pooled Least Square (PLS)*, ditolak. Simpulan, model terestimasi terbaik adalah *FEM*.

Uji Hausman adalah uji statistik untuk memilih model terestimasi *FEM* atau *REM*.  $H_0$  uji Hausman: model adalah *Random Effects Model (REM)* dan  $H_A$ -nya: model adalah *Fixed Effects Model (FEM)*.  $H_0$  diterima jika nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2 > \alpha$ ;  $H_0$  ditolak bila nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2 \leq \alpha$ . Hasil Uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	10,179109	4	0,0375

Dari Tabel 3, terlihat nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2$  sebesar 0,0375 ( $< 0,10$ ), jadi  $H_0$  diterima. Simpulan, model terestimasi terbaik adalah model *FEM*. Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, dengan demikian, *FEM*

terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model FEM tersaji pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Model Estimasi Fixed Effect Method

$$\begin{aligned} \text{KMS}_{it} = & 5104,574 + (-0,004990) \text{PDRB}_{it} + (-39,59977) \text{IPM}_{it} + 121,4156 \text{TP}_{it} \\ & (0,0278)^{**} \quad (0,1751) \quad (0,0001)^* \\ & + (-0,022394) \text{LIS}_{it} \\ & (0,0032)^* \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,993128 ; \text{DW-Stat} = 0,683437 ; \text{F-Stat} = 751,5390 ; \text{Sig. F-Stat} = 0,0000$$

Keterangan: \* Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ ; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t statistik.

Tabel 5. Effect dan Konstanta Cross Section

No	Provinsi	Effect	Konstanta
1	DKI Jakarta	-782,9559	4321,6181
2	Jawa Barat	1887,608	6992,182
3	Jawa Tengah	2096,523	7201,097
4	DI Yogyakarta	-1741,881	3362,693
5	Jawa Timur	2740,357	7844,931
6	Banten	-2261,780	2842,794
7	Bali	-1937,871	3166,703

### Uji Kebaikan Model

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji  $F$ . Formulasi hipotesisnya:  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis);  $H_A: \beta_1 \neq 0 \mid \beta_2 \neq 0 \mid \beta_3 \neq 0$  (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis).  $H_0$  akan diterima jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F > \alpha$ ;  $H_0$  akan ditolak jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F \leq \alpha$ . Dari Tabel 4, terlihat nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F$  bernilai 0,0000 ( $< 0,01$ ); jadi  $H_0$  ditolak. Simpulan, model terestimasi  $FEM$  eksis.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Dari Tabel 4 terlihat nilai  $R^2$  sebesar 0,993128, artinya 99,31% variasi variabel Tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan jumlah pemakaian listrik. Sisanya, 0,69%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model

### Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji  $t$ .  $H_0$  uji  $t \beta_i = 0$ : variabel independen ke  $i$  tidak memiliki pengaruh signifikan;  $H_A$ -nya  $\beta_i \neq 0$ : variabel independen ke  $i$  memiliki pengaruh signifikan.  $H_0$  akan diterima jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $t > \alpha$ ;  $H_0$  akan ditolak jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $t \leq \alpha$ . Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	t	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
PDRB	-2,262832	0,0278	< 0,05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
IPM	-1,374785	0,1751	> 0,10	Tidak Signifikan
TP	4,385120	0,0001	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
LIS	-3,094774	0,0032	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

### Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 6., terlihat Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB), pengangguran (TP), dan jumlah pemakaian listrik (LIS) memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Variabel Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) memiliki koefisien regresi sebesar -0,004990, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) naik sebesar 1 ribu rupiah, maka Tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,990 jiwa. Sebaliknya, jika Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) turun sebesar 1 ribu rupiah, maka Tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 4,990 ribu jiwa.

Variabel pengangguran (TP) memiliki koefisien regresi sebesar 121,4156, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, bila pengangguran naik 1%, maka Tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 121.415,6 jiwa. Sebaliknya, jika pengangguran turun 1%, maka Tingkat kemiskinan akan turun sebesar 121.415,6 jiwa.

Variabel pemanfaatan listrik (LIS) memiliki koefisien regresi sebesar -0,022394, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, bila pemanfaatan listrik naik 1 Gwh, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 22,394 jiwa. Sebaliknya, jika pemanfaatan listrik turun 1 Gwh, maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 22,394 jiwa.

Nilai konstanta masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai konstanta tertinggi dimiliki Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 7844,931. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, jumlah pemakaian listrik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011-2019, maka Provinsi Jawa Timur cenderung memiliki Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan, nilai konstanta terendah dimiliki Provinsi Banten sebesar 2842,794. Karena itu, terkait dengan pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan jumlah pemakaian listrik terhadap Tingkat kemiskinan, Provinsi Banten cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

### 3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB), pengangguran, dan jumlah pemakaian listrik memiliki pengaruh signifikan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali mengalami penurunan dari tahun 2011-2019. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali. Penurunan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. PDRB per kapita merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Pada hasil penelitian ini, PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita. Apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin. Dengan demikian penduduk di wilayah tersebut semakin sejahtera dan tingkat kemiskinan pun akan berkurang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ritonga & Wulantika (2020), Leonita & Sari (2019), dan Baihaqi & Puspitasari (2020) yang menyatakan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB), maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. PDRB per kapita mewakili rata-rata kinerja perekonomian penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut semakin baik. Jika kesejahteraan penduduk semakin membaik, maka jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin menurun.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Seperti yang diketahui bahwa pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah seperti ekonomi dan sosial, yang berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin merosot. Tingginya angka pengangguran, secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara social mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat. Dampak dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan demikian secara perlahan masyarakat akan terdorong pada kelompok penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Budhijana (2019), Ishak et al (2020), Ariyanti (2019) bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Temuan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Baihaqi & Puspitasari (2020) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini bisa terjadi

karena konsep pengangguran terbuka yang digunakan BPS adalah bukan penduduk miskin tetapi orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari, mempersiapkan, mendapatkan pekerjaan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selain PDRB per kapita dan tingkat pengangguran, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah jumlah pemakaian listrik. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah pemakaian listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa jumlah pemakaian listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi karena setiap aktivitas tergantung pada daya listrik. Selain itu, pertumbuhan pendapatan lebih cepat di provinsi yang sudah dialiri listrik daripada yang belum. Ketersediaan energi baik dari segi kualitas maupun kuantitas mampu mengurangi kemiskinan. Jumlah pemakaian listrik yang berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Okwanya & Abah (2018) dan Sumardjoko & Akhmadi (2019) yang menunjukkan peningkatan konsumsi energi menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Kousar et al. (2020) mengungkapkan kemiskinan akan meningkat akibat kekurangan energi karena menghambat produksi dan membatasi kegiatan perekonomian. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa degradasi lingkungan sebagian menjadi perantara antara konsumsi energi dan kemiskinan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa dan Bali. Tidak adanya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan ini bisa terjadi karena belum adanya pemerataan pembangunan manusia. Terlihat bahwa selama ini pembangunan manusia yang lebih baik terjadi di kota besar dan baru menjangkau sekian wilayah dari total keseluruhan provinsi di Indonesia. Walaupun indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya ternyata tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Purboningtyas et al. (2020) yang menyatakan Indeks pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019. Temuan penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Leonita & Sari (2019) bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian dari Hasibuan et al (2020) menyatakan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan berdasarkan data penurunan persentase kemiskinan di Indonesia tidak merata dan mempunyai banyak *outlier*. Untuk kemiskinan dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga barang yang berakibat



menurunnya tingkat pengeluaran perkapita ketika tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan.

#### 4. Kesimpulan

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel, dan model yang terpilih dalam estimasi data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, karena tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Bali rata-rata meningkat sehingga mampu mengurangi kemiskinan.

Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Bali, karena bertambahnya tingkat pengangguran akan menambah jumlah tingkat kemiskinan. Variabel tingkat penggunaan listrik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Bali karena bertambahnya penggunaan listrik akan menurunkan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, karena IPM di Jawa Bali yang setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga kenaikan IPM menambah biaya pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurunkan pengangguran, dan peningkatan jumlah pemakaian listrik. Tingginya pertumbuhan PDRB, akan menekan angka pengangguran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan dengan biaya pendidikan yang murah sehingga akan berdampak positif pada peningkatan skill/keterampilan masyarakat, sehingga meningkatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kebijakan penetapan upah minimum harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan layak hidup (KHL) dan posisi pemerintah dalam penetapan upah minimum harus sebagai penyeimbang.

#### Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada civitas akademika Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu menyelesaikan naskah penelitian ini.

#### Referensi

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Ariyanti, L. D. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1, 1059–1067.
- Baihaqi, A. B., & Puspitasari, M. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

*Journal Publicuho*, 3(2), 177–192.

- Budhijana, R. B. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 5(1), 36–44.
- Gujarati, D. N. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141.
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53.
- Kalsum, U. (2017). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1183>
- Kousar, S., Ahmed, F., Pervaiz, A., Zafar, M., & Abbas, S. (2020). A Panel Co-Integration Analysis between Energy Consumption and Poverty: New Evidence from South Asian Countries. *Estudios de Economia Aplicada*, 38(3), 1–16.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1–8.
- Meidiana, N. P. C. A. T., & Marhaeni, A. A. I. N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, dan Pendidikan terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(1), 54–69. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i01.p04>
- Okwanya, I., & Abah, P. O. (2018). Impact of Energy Consumption on Poverty Reduction in Africa. *CBN Journal of Applied Statistics*, 9(1), 105–139.
- Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal PKS*.
- Purboningtyas, I., Sari, I. R., Guretno, T., Dirgantara, A., Agustina, D., & Haris, M. Al. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JURNAL SAINTIKA UNPAM: Jurnal Sains dan Matematika Unpam*, 3(1), 81–88.
- Ritonga, M., & Wulantika, T. (2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018). *Jurnal Diversita*, 6(1), 95–102.
- Rustan. (2019). *Pusaran Pembangunan Ekonomi*. Makassar: CV Sah Media.
- Sumardjoko, I., & Akhmadi, M. H. (2019). Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Sebagai Daya Ungkit Ekonomi dan Pemangkas Kemiskinan Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 22–31.
- Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v1i1.3764>

- Wildana Wargadinata. (2011). Islam dan Pengentasan Kemiskinan. *UIN Maliki Press*.
- Zuhdiyaty, N. (2017). Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka*, 1(2), 27–31.